



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KOTA PIRING
GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH
TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 510 /KPTS-1.6 / I /2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 394);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2018

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIS DAERAH,**



Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si
NIP.19660216 198602 1 003

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Organisasi dan KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 510/KPTS-1.6/I/2018

Tanggal : 5 Januari 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Nama Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan dibagi Persentase Target Fisik dan Keuangan dikali 100	Biro Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
2	Meningkatnya Rekomendasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan	Biro Administrasi Perekonomian	Biro Administrasi Perekonomian
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Skor rata-rata tingkat kesehatan BUMD	Skor	Jumlah BUMD yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dinyatakan	Biro Administrasi Perekonomian	Biro Administrasi Perekonomian

				sehat dibagi Total Jumlah BUMD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100		
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah yang akuntabel	Peringkat LPPD provinsi	Peringkat	Peringkat LPPD Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan dan Perbatasan
		Persentase penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah	%	Realisasi Skor PPD dibagi Target Skor PPD dikali 100	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Biro Pemerintahan dan Perbatasan
5	Terwujudnya organisasi pemerintah Provinsi Kepri yang tepat fungsi dan tepat ukur	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	Jumlah OPD yang Tertata Kelembagaannya dibagi Jumlah Total OPD dikali 100	Biro Organisasi dan KORPRI	Biro Organisasi dan KORPRI
6	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Provinsi Kepulauan Riau	Nilai/ Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai/ Indeks	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB	Kementerian Penda-yagunaan Aparatur dan Reformasi Birokasi	Biro Organisasi dan KORPRI
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Indeks	Nilai/Indeks Kepuasan Masyarakat	Kementerian Penda-yagunaan Aparatur dan	Biro Organisasi dan KORPRI

		organisasi perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau			Reformasi Birokasi	
8	Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	Jumlah paket proyek strategis yang dilaksanakan pengadaan barang/jasanya tepat waktu dibagi jumlah total paket proyek strategis dikali 100	Biro Administrasi Layanan Pengadaan	Biro Administrasi Layanan Pengadaan
9	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Dokumen	Jumlah Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Biro Hukum	Biro Hukum

10	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	%	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang sesuai dengan SOP dibagi Total kegiatan KDH/WKDH yang sesuai dengan SOP dikali 100	Biro Umum	Biro Umum
11	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	%	Jumlah SOP pelayanan umum yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah SOP pelayanan umum yang ada dikali 100	Biro Umum	Biro Umum
12	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	%	Jumlah aset di Sekretariat Daerah yang dikelola dan dipelihara dibagi jumlah total aset di Sekretariat Daerah dikali 100	Biro Umum	Biro Umum
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase mubaligh yang tersertifikasi	%	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina dikali 100	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase santri yang menjadi hafiz	%	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
14	Meningkatnya akses pelayanan umum dan	Persentase media massa yang	%	Jumlah media yang menyiarkan kegiatan	Biro Humas, Protokol dan	Biro Humas, Protokol dan

	informasi penyelenggaraan pemerintahan	menyiar-kan kegiatan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyebar-luasan informasi penyelenggaraan pemerin-tah daerah		Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibagi Jumlah media yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Penghu-bung	Penghu-bung
--	--	--	--	---	-------------	-------------

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIS DAERAH,**



Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si
NIP.19660216 198602 1 003